

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berhasrat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat disemua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memajukan kesejahteraan rakyat agar setiap warganya mencapai kesejahteraan dengan taraf hidup minimum yang layak bagi kemanusiaan. Kesejahteraan masyarakat menjadi pusat perhatian pada beberapa tahun terakhir ini dan yang paling meningkat yaitu pusat perhatian terhadap kesejahteraan anak.

Perkembangan sosial, budaya, politik, ekonomi, teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang cepat secara langsung maupun tidak, mempengaruhi tatanan kehidupan dan budaya suatu bangsa. Di kota-kota besar misalnya, pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tinggi, mengakibatkan banyak permasalahan sosial yang tumbuh di masyarakat. Masyarakat pendatang di perkotaan merupakan fenomena yang selalu berhubungan dengan keberadaan dan perkembangan kota sejak dahulu. Kedatangan orang miskin ke perkotaan telah memperburuk situasi perkotaan seperti masalah perumahan dengan pemukiman yang kumuh, kerusakan lingkungan dengan konsentrasi penduduk sepanjang sungai dan penggunaan bahu jalan sebagai tempat usaha.

Banyak masyarakat pendatang melakukan urbanisasi di kota besar hanya dengan modal kemampuan dan keterampilan yang pas-pasan ditengah sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, menjadi pengangguran, tak memiliki tempat tinggal dan hidup dengan kondisi ekonomi yang lemah. Kesulitan para pendatang tersebut dalam mencari nafkah telah pula menimbulkan berbagai tindak pelanggaran dan kejahatan. Mereka inilah yang kemudian terpinggirkan atau yang biasa disebut kaum marinal di kota-kota besar. Masyarakat pendatang dalam kesehariannya sebagian besar bekerja di sektor informal sebagai pedagang kecil kaki lima (PKL), tukang becak, kuli

bangunan, makelar, sopir dan pekerja.

serabutan. Pada umumnya suami istri bergelut mencari nafkah sehingga pendidikan anak terabaikan. Banyak anak yang terampas haknya untuk bermain di sekolah disebabkan faktor ekonomi yang mengakibatkan ketidakberdayaan orangtua untuk menjaga dan melindungi mereka serta memenuhi kebutuhannya, sehingga menjadikan anak-anak mereka sebagai tumpuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar pokok bagi masyarakat, salah satu cerminan dari kesejahteraan masyarakat adalah tingginya masyarakat yang mampu untuk melaksanakan pendidikan. Hal ini secara jelas tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara antara lain memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa."Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of the Child) pada tahun 1990. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28) dan konvensi mengenai HAM yang menyatakan "Setiap orang berhak atas pendidikan". Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwasetiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut.

Program Wajib Belajar Sembilan Tahun juga menuntut pemerintah untuk terus berkomitmen memenuhi hak wajib belajar sembilan tahun bagi anak-anak Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12 Pada Pasal

34 juga dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun sayangnya, pemerintah sendiri belum maksimal dalam melaksanakan program tersebut lantaran sedikitnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan permasalahan lainnya. Gugatan masyarakat terhadap pemerintah menyangkut tanggung jawabnya yang rendah dalam pembiayaan pendidikan warganya telah lama dilontarkan. Tapi, sampai sekarang belum ada perbaikan yang signifikan. Kehendak baik baru muncul dalam konstitusi baru, yang merupakan hasil amandemen UUD 1945.<sup>14</sup> Dalam amandemen keempat (10 Agustus 2002) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berhasil disepakati rumusan pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Namun dalam praktiknya, ternyata pemenuhan hak atas pendidikan menjadi sulit bahkan cenderung tidak terlaksana dengan baik. Pendidikan formal seringkali sulit untuk dijangkau oleh masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah karena biayanya yang relatif mahal. Hal seperti ini menyulitkan anak-anak jalanan untuk menjangkau pendidikan formal tersebut. Dalam hal ini negara melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan guna memenuhi hak-hak warga negara akan suatu pendidikan khususnya anak jalanan dapat dilaksanakan melalui pendidikan non formal.

Kota Malang dikenal dengan kota pendidikan. Memiliki berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri, sekolah, pondok pesantren tempat kursus. Pelajar yang mengenyam pendidikan di kota ini tidak hanya dari penduduk asli namun dari berbagai daerah. Namun yang menjadi permasalahan masih banyak penduduk kota Malang sendiri belum mendapatkan pendidikan dengan baik salah satunya adalah anak jalanan yang tidak asing lagi bagi masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) kota Malang jumlah anak jalanan tahun 2016 sebanyak 104, 2017 sebanyak 108 dan 2018 sebanyak 176. Dari data tersebut menandakan bahwa tiap tahun jumlah anak jalanan semakin

bertambah.

**Table 1. 1 Badan Pusat Statistik Jumlah Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah	Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Malang Menurut Jenis Kelamin (Persen(%))								
	Laki-Laki			Perempuan			TOTAL		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
7 – 12 Tahun	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
15 Tahun	6,18	6,09	2,20	0,00	3,41	4,54	3,47	4,81	3,39
18 Tahun	19,20	23,64	14,32	12,60	8,24	17,08	16,13	14,80	15,70
24 Tahun	40,71	41,28	41,38	46,55	40,25	49,88	43,74	40,78	40,62

*Sumber : BPS Malang*

Untuk mengatasi permasalahan minimnya pendidikan yang didapat oleh anak putus sekolah, kini banyak kita temui berbagai macam model pelaksanaan pendidikan nonformal yang memang dibentuk untuk memfasilitasi keterbatasan sebagian anak-anak untuk mengakses pendidikan. Sebut saja berbagai rumah baca, rumah singgah, sanggar-sanggar, hingga yayasan pendidikan banyak bermunculan ditengah masyarakat tak lain untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan adanya berbagai macam bentuk pendidikan non-formal tersebut, anak-anak yang terbatas secara ekonomi dan waktu dapat tetap mengenyam Pendidikan.

Yang akan di jabarkan dari objek rancangan Sekolah Non-Formal merupakan objek yang pemberdayaan bagi masyarakat. Objek rancangan yang akan di buat dalam berupa bentuk bangunan sekolah dengan didirikannya bangunan sekolah non- formal ini dapat menjadi alternatif sekolah bagi anak-anakyang kurang mampu dan terkendala masalah sosial. Meski banyak dengan keterbatasan fasilitas diharapkan anak - anak dapat kembali mengenyam pendidikan, tidak kehilangan masa bermainnya dan tentunya memiliki

kesempatan untuk memiliki hidup yang lebih baik.

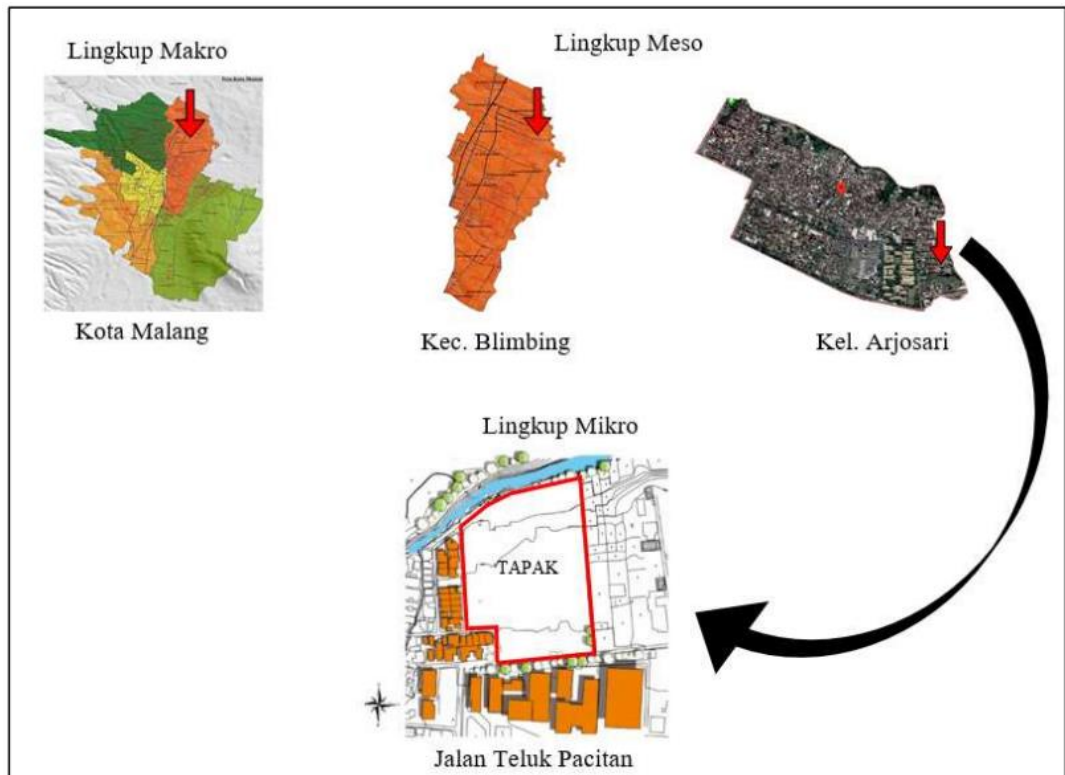
### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, berikut akan dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu belajar dan ekonomi anak jalanan karena harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi
2. Terbatasnya akses pendidikan bagi anak yang tidak mampu dan membutuhkan.
3. Motivasi belajar anak yang minim.
4. Lingkungan kota yang keras dan tidak layak untuk kegiatan pendidikan anak-anak.

### **1.3 Lokasi**

Lokasi perancangan Pusat Pendidikan Non-Formal di Kota Malang berada di Jln. Teluk Pacitan, kel. Arjosari, Kota Malang yang berada dikecamatan Blimbing yang berbatasan dengan kecamatan Singosari di sebelah Utara, kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen di sebelah selatan, Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Pakis di sebelah timur serta kecamatan Lowokwaru dan kecamatan Klojen di sebelah Barat.



**Gambar 1. 1 Loksi Tapak**  
*Sumber: Dokumen Pribadi di akses pada Desember 2022*

#### 1.4 Tujuan Perancangan

Menghasilkan rancangan Pusat Pendidikan Non – Formal di Kota Malang sebagai dunia pendidikan khususnya pendidikan agama islam serta mewadahi kebutuhan keterampilan dan kesenian anak. Selain itu mendapatkan hak perlindungan, kesehatan, keamanan dll. berdasarkan pendekatan arsitektur perilaku.

Adapun manfaat yang hendak dicapai yaitu :

- Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberi bimbingan dalam hal perkembangan individu untuk membentuk masa depan bagi anak terlantar berdasarkan pendekatan arsitektur perilaku.

- Manfaat Praktis

Mendapatkan pandangan tentang tujuan hidup dan mengetahui

orientasi masa depan sehingga digunakan sebagai pedoman dalam berkehidupan.

### **1.5 Tema**

Dalam proses merancang diperlukan pendekatan rancangan agar dalam penerapannya lebih terarah. Pendekatan Arsitektur yang dipilih dalam perancangan Pusat Pendidikan Non – Formal di Kota Malang adalah pendekatan Arsitektur perilaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Kata perilaku menunjukkan manusia dalam aksinya, berkaitan dengan aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan sesamanya ataupun dengan lingkungan fisiknya (Tandal dan Egam, 2011).

Menurut buku (Soekidjo Notoatmodjo 2003) tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Sedangkan menurut (Skinner 1938) yang dikutip dalam buku



Soekidjo Notoatmodjo 2003 menyatakan bahwa perilaku merupakan reaksi/respon seseorang terhadap stimulus dari luar. Sehingga perilaku terjadi melalui proses stimulus terhadap organisme, kemudian organisme merespon. Dapat disimpulkan teori Skinner ini S-O-R (stimulus-organisme-respon). Teori tentang perilaku manusia ini dapat disimpulkan membahas tentang tentang pengamatan perilaku manusia yang terlihat dan hanya ingin melihat bagaimana pola perilaku manusia terhadap lingkungan disekitarnya.

Untuk lebih memahami Arsitektur Perilaku, berikut contoh “Lingkungan yang Mempengaruhi Perilaku Manusia” dan “Perilaku Manusia yang Mempengaruhi Lingkungan :

- Manusia cenderung menduduki suatu tempat meskipun fungsi sebenarnya tempat itu bukan tempat duduk. Misalnya: susunan anak tangga didepan rumah, bagasi mobil yang besar, pagar yang rendah dan lain sebagainya.
- Disuatu kondisi manusia cenderung memilih jalan pintas melintasi rumput taman yang dianggapnya terdekat dari pada melewati pedestrian yang memutar. Sehingga orang tersebut tanpa sadar telah membuat jalur sendiri meski telah disediakan pedestrian.

Menurut (Garry T. More dalam buku Introduction to Architecture). Istilah perilaku diartikan sebagai suatu fungsi dari tuntutan-tuntutan organism dalam dan lingkungan sosio-fisik luar. Penkajian perilaku menurut Garry T. More diartikan dengan lingkungan sekitar yang lebih dikenal sebagai pengkajian lingkungan- perilaku. Adapun pengkajian lingkungan\_perilaku seperti yang dimaksudkan oleh Garry T. More terdiri atas definisi – definisi sebagai berikut:

1. Meliputi penyelidikan sistematis tentang hubungan-hubungan antara lingkungan dan perilaku manusia dan penerapannya dalam proses perancangan.
2. Pengkajian lingkungan-perilaku dalam Arsitektur mencakup lebih

banyak dari pada sekedar fungsi.

3. Meliputi unsure-unsur keindahan estetika, diaman fungsi bertalian denga perilaku dan kebutuhan oang, estetika bertalian dengan pilihan dan pengalaman. Jadi estetika formal dilengkapi dengan estetika hasilpengalaman yang bersandar pada si pemakai.
4. Jangkauan faktor perilaku lebih mendalam, pada psikologi si pemakai bangunan , kebutuhan interaksi kemasyarakatan, perbedaan-perbedaan sub budaya dalam gaya hidup dan makna serta simbolisme banguan.
5. Pengkajian lingkungan-lingkungan juga meluas ke teknologi, agar isyarat- isyarat Arsitektur dapat memberikan penampilan kemantapan atau perlindungan.

Menurut (Y.B Mangun Wijaya dalam buku Wastu Citra). Arsitektur berwawasan perilaku adalah Arsitektur yang manusiawi, yang mampu memahami dan mewadahi perilaku-perilaku manusia yang ditangkap dari berbagai macam perilaku, baik itu perilaku pencipta, pemakai, pengamat juga perilaku alam sekitarnya. Disebutkan pila bahwa Arsitektur adalah penciptaan suasana, perkawinan guna dan citra. Guna merujuk pada manfaat yang ditimbulkan dari hasil rancangan. Manfaat tersebut diperoleh dari pengaturan fisik bangunan yang sesuai dengan fungsinya. Namun begitu guna tidak hanya berarti manfaat saja, tetapi juga menghasilkan suatu daya yang menyebabkan kualitas hidup kita semakin meningkat. Cita merujuk pada image yang ditampilkan oleh suatu karya Arsitektur. Citra lebih berkesan spiritual karena hanya dapat dirasakan oleh jiwa kita. Citra adalah lambing yang membahasakan segala yang manusiawi, indah da agung dari yang menciptakan (Mangunwijaya, 1992).

Menurut Victor Papanek Bahwa dalam telaah-telaah lingkungan dalma arsitektur, harus dipahami dua kerangka konsep yang satu menjelaskan jajaran informasi lingkungan perilaku-perilaku yang tersedia, dan yang lain memperhatikan diaman proses perancangan informasi lingkungan perilaku

paling mempengaruhi pengambilan keputusan Arsitektur.

## **1.6 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada pembahasan dalam judul Pusat Pendidikan Non-Formal di Kota Malang yaitu :

- Bagaimana merancang pendekatan tema arsitektur perilaku khususnya terhadap perilaku anak-anak?
- Bagaimana merancang terkait pengaruh lingkungan sekitar tapak terhadap penerapan tema arsitektur perilaku?

## **1.7 Identifikasi Masalah**

### **Permasalahan Judul Dengan Tema**

- Bangunan yang akan dirancang mengaplikasikan konsep arsitektur lokal dengan gaya arsitektur perilaku.

### **Permasalahan Judul Dengan Tapak**

- Kekurangan dan kelebihan dari penetapan bangunan sekolah non – formal yang akan dirancang di kota Malang.
- Menentukan desain rancangan dengan tema arsitektur perilaku yang sinkron dengan lokasi tapak.
- Tapak merupakan zona sarana pelayanan umum hal ini sesuai dengan fungsi rancangan.

### **Permasalahan Tema Dengan Tapak**

Penerapan tema Arsitektur perilaku karena Kawasan tapak merupakan zona pelayanan umum sehingga sangat cocok dengan fungsi bangunan oleh karena itu penerapan yang cocok pada bangunan Pusat Pendidikan Non – Formal di Kota Malang.

## **1.8 Batasan Perancangan**

Adaapun Batasan masalah dalam rancangan ini yaitu meliputi:

1. Rancangan lebih ditekankan dalam bentuk atau wujud visual bangunan yang dengan menerapkan aspek perancangan dan perancangan arsitektur perilaku.
2. Kegiatan yang ada dalam rancangan meliputi kegiatan sosial budaya, kegiatan edukatif/ Pendidikan dan kegiatan visual .
3. Peraturan mengenai kondisi fisik bangunan disesuaikan dengan

peraturan tata ruang dan karkteristik bangunan yang berlaku di lokasi site yang akan di rencanakan